

# SEJARAH RAT SRAN RAJA KOMISI KAIMANA

## *(History of Rat Sran King of Kaimana)*

Desy Polla Usmany  
Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura  
[usmanydesy@yahoo.com](mailto:usmanydesy@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*Kaimana kingdom led by the Rat Sr10an, means King of Sran or King of Commission. Initially this kingdom exists enough, but gradually fading effect, even more memorable. This article departs from the research that aims to describe the genesis of the King Sran, government and powers of the period before the entry of the Netherlands until the time of Dutch rule. The study revealed that the historical method Sran kingdom was established in 1309. The first named of Rat Sran king is Imaga who hold Nati Patimunin I. This kingdom migrate three times, namely from Patimunin, Adi Island, and the city of Kaimana. Sran kingdom until 1440 been progressing quite rapidly, but subsequently degraded power due to the inclusion of Tidore, a conflict between the royal family, as well as changes in the system of government after the entry of the Dutch government.*

**Keywords:** Rat Sran, Kaimana, government

### **ABSTRAK**

Kerajaan Kaimana dipimpin oleh Rat Sran, berarti Raja Sran atau Raja Komisi. Awalnya kerajaan ini cukup eksis, namun lambat laun memudar pengaruhnya, bahkan semakin terlupakan. Artikel ini berangkat dari penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kembali asal usul Raja Sran, pemerintahan serta kekuasaannya dari masa sebelum masuknya Belanda hingga masa pemerintahan Belanda. Penelitian dengan metode sejarah mengungkapkan bahwa Kerajaan Sran berdiri tahun 1309. Raja pertama bernama Imaga yang bergelar Rat Sran Nati Patimunin I. Kerajaan ini berpindah tempat sebanyak tiga kali, yaitu dari Patimunin, Pulau Adi, dan Kota Kaimana. Kerajaan Sran hingga tahun 1440 mengalami perkembangan cukup pesat, namun selanjutnya mengalami degradasi kekuasaan akibat masuknya Tidore, konflik diantara keluarga kerajaan, serta perubahan sistim pemerintahan setelah masuknya pemerintah Belanda.

**Kata kunci:** Rat Sran, Kaimana, pemerintahan

Tanggal masuk : 28 April 2014  
Tanggal diterima : 2 Juni 2014

## PENDAHULUAN

Kata *Rat*, dalam bahasa Indonesia berarti Raja. Sedangkan *Sran* adalah nama kerajaan dan wilayah kekuasaannya di Kaimana. Kata *Sran* tertulis dalam kitab *Negarakertagama*. Kerajaan ini pernah vakum akibat konflik kekuasaan dalam keluarga, akibatnya generasi Papua abad XX, tidak mengetahui kerajaan ini. Mereka, lebih mengenal raja *Sran* sebagai raja Komisi Kaimana.

Secara geografis, di Papua terdapat tiga wilayah yang sistem pemerintahan tradisionalnya berbentuk kerajaan yaitu kepulauan Raja Ampat, Semenanjung Onin dan Kowiai (Mansoben, 1995). Menurut Swartz Turner dan Tuden (1966:14), kekuasaan memiliki dua sisi komponen, yaitu konsensus dan paksa. Kekuasaan konsensus adalah kekuasaan yang dijalankan atas dasar persetujuan bersama yang dapat terjadi bilamana pengikut dapat mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemimpinnya dengan kesadaran bahwa itu adalah demi kepentingan bersama mereka. Sedangkan kekuasaan paksa adalah tipe kekuasaan yang memaksakan kehendak para pemimpin kepada para pengikutnya dengan menggunakan kekerasan baik berupa kekerasan fisik maupun material. Pemimpin pada kekuasaan konsensus, biasanya rela berkorban bagi rakyatnya.

Dari uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa kekuasaan para Raja *Sran* Raja Komisi Kaimana di Kaimana Papua nampak termasuk dalam komponen kekuasaan konsensus, karena Kerajaan *Sran* berdiri atas dasar persetujuan bersama. Namun dalam perjalanannya, kekuasaan kerajaan ini mengalami pasang surut yang semakin mengurangi legitimasi raja, sehingga tidak dapat menopang kekuasaan mereka dari masa ke masa.

Salah satu faktor penyebab kemunduran kerajaan ini antara lain

dengan ditetapkannya Fakfak sebagai pusat pemerintahan oleh Belanda. Akibatnya, kedudukan raja berubah drastis. Raja menjadi penguasa di daerahnya, namun rakyatnya bukan lagi sepenuhnya berada di dalam kekuasaannya, karena raja maupun rakyatnya berada dalam kekuasaan pemerintah Belanda.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana asal usul Raja *Sran* Raja Komisi Kaimana dan pemerintahannya. Bagaimana kekuasaan Raja *Sran* Raja Komisi Kaimana dari masa sebelum masuknya Belanda dan masa pemerintahan Belanda.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan asal usul Raja *Sran* Raja Komisi Kaimana dan pemerintahannya serta kekuasaan Raja *Sran* Raja Komisi Kaimana dari masa sebelum masuknya Belanda dan masa pemerintahan Belanda.

Kajian ini digunakan metode sejarah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai prosedur kerja sejarah yaitu melalui empat tahap (Nugroho Notosusanto, 1987) yaitu: Heuristik dilakukan untuk mencari dan menemukan sumber data berupa sumber primer dan sekunder (kepuustakaan dan wawancara). Berdasarkan data yang terhimpun, dilakukan kritik interen untuk menilai kredibilitas data dalam sumber, dan kritik ekstern untuk menilai keakuratan sumber data. Data yang telah dikritik. Selanjutnya diinterpretasi dan dirangkai secara kronologis dan sistematis menjadi sebuah kisah (historiografi).

## PEMBAHASAN

### Asal Usul *Rat Sran* Raja Komisi Kaimana

Raja-raja *Sran* berasal dari kawasan pegunungan Mbaham, Tiri

Abuan Wanas. Leluhur mereka awalnya tinggal dan menetap di Gunung Baik yang terletak di Semenanjung Kumawa. Sekarang kawasan ini lebih dikenal sebagai kawasan Patimuin. Menurut penuturan Abdul Hakim Ahmad Aituarauw (Raja Sran Kaimana VIII), sejarah terbentuknya pemerintahan adat raja-raja Sran Kaimana adalah usaha raja pertama bernama Imaga.

Pada awal pemerintahan Raja Imaga, penduduk yang mendiami kerajaan itu belum banyak. Untuk menghimpun dan menyatukan mereka dalam satu pemerintahan adat, leluhur Raja Imaga, berjalan dari kampung ke kampung untuk menanamkan pengaruhnya. Selain dengan cara mengunjungi kampung-kampung, cara lain yang dilakukan adalah dengan cara perkawinan, sehingga hampir di semua wilayah ada keluarganya. Alhasil para penduduk kampung-kampung tersebut berhasil dihimpun dan mengangkatnya sebagai raja pada 1309. Dapat dikatakan bahwa kerajaan ini adalah kerajaan keluarga, karena Imaga sebenarnya menjadi pemimpin bagi keluarganya sendiri.

Raja Imaga, bergelar Rat Sran Nati Patimuin I. Kata Patimuin digunakan karena kerajaan pertama tersebut berlokasi di daerah Patimuin. Ia membangun pusat kerajaannya di Weru, sebuah tempat di Teluk Tunas Gain di wilayah Fakfak. Raja memiliki dua pendamping yaitu *duduvura* adat dan raja muda yang kedudukannya dalam bagan lembaga adat sejajar dengan raja, namun secara kekuasaan berada di bawah kekuasaan raja. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh: pemuka agama, dukun/ahli nujum, *mayora*, *sangaji*, *hukom*, *joujau*, *kapitang*/kapitan laut dan orang kaya. Wilayah kerajaan Sran pada masa awal berdirinya kerajaan hanya meliputi bagian-bagian kecil saja dari wilayah suku suku Mairasi di sebelah utara, Pulau Adi di sebelah selatan,

Pulau Samai di sebelah barat dan Kipia Mimika di sebelah timur. Namun berkat perkawinan dan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang berhasil dilakukan oleh raja pertama, maka lambat laun banyak warga-warga suku tersebut yang mulai menggabungkan diri dengan kerajaan Sran, sehingga menurut legendanya, wilayah kekuasaan Raja Sran pada abad ke-14 berkembang menjadi semakin luas.

### **Kekuasaan Raja Sran Raja Komisi Kaimana Sebelum Kedatangan Belanda**

Raja pertama yang bernama Imaga, seperti diketahui telah berhasil mendirikan kerajaan Sran. Nama Sran tercatat dalam buku *Negarakertagama* yang ditulis oleh Mpu Prapanca tahun 1364/1365 yakni syair 13, 14 dan 15 (Onim, 2006). Raja Imaga memiliki seorang kakak bernama Imuli. Turunannya saat ini tinggal di Fakfak dan terkenal sebagai Joupriad dan Paduade.

Semasa pemerintahan raja Imaga, kondisi kehidupan masyarakat cukup baik. Mereka menjalin hubungan perdagangan dengan orang-orang Seram laut (Seram timur), yang mencari burung kuning, masoi dan emas di wilayah tersebut. Para pedagang Seram laut (Serandha/Seram timur) pun melakukan perkawinan dengan penduduk tanah daratan Papua.

Setelah raja Imaga wafat (tahun tidak diketahui), Raja Sran selanjutnya adalah "Basir Onin" anak dari Imaga. Ia memindahkan kerajaannya ke Pulau Adi karena itu ia bergelar Rat Sran Adi II. Pemindahan kerajaan didasarkan atas pertimbangan bahwa Pulau Adi terletak pada posisi strategis dalam lalu lintas pelayaran dan perdagangan menuju dataran Kowiai. Ia menyatakan sepuh kemudian mengangkat anaknya Woran sebagai Raja. Ibukota kerajaannya terletak di Borombouw.

Raja Woran bergelar Rat Sran Rat Adi III. Pada masa pemerintahan Woran, kerajaan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ia mengikuti langkah raja Imaga untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya dengan cara mengunjungi desa-desa serta melakukan pernikahan di berbagai tempat. Sehingga menurut Raja Sran Kaimana VIII, hampir sebagian besar hidup raja-raja dahulu adalah untuk mengunjungi kampung-kampung guna menghimpun mereka dalam kepemimpinannya dan melakukan perkawinan. Itu sebabnya mereka memiliki banyak istri dan keluarga di hampir sebagian besar daerah Papua bagian barat daya.

Hasil usaha raja Woran membuat wilayahnya berkembang meliputi dataran semenanjung Onin, dataran Bomberay dan dataran Kaimana yang berbatasan dengan tanah rendah Kamoro. Woran memerintah dalam waktu yang cukup lama dan mengangkat anaknya Wau'a sebagai Putra Mahkota, sayangnya Wau'a meninggal dalam usia mudah sebelum sempat menjadi Raja.

Dalam masa kepemimpinan Raja Woran, kerajaannya pernah dikunjungi oleh Patih Gajah Mada. Kunjungan ini tercatat dalam tulisan Empu Prapanca yang menyebutkan suatu daerah yang bernama Sran yang pernah dikunjungi oleh Patih Gajah Mada dalam upaya menggenapi Sumpah Palapa yang diucapkannya kepada raja Majapahit. Dalam kunjungannya ke istana raja Sran Rat Adi III yang diberi nama istana *San Nabe* di Borombow, Pulau Adi, beliau disambut dengan upacara kebesaran. Dalam kunjungan itu, Patih Gajah Mada memberikan seorang putri dan bendera merah putih kepada raja Woran; sedangkan raja Woran memberikan burung Cenderawasih (*syangga*) dan seorang putri raja untuk diantar kepada raja Majapahit (Renaissance Nusantara Edisi Raja

Sran Kaimana VIII, 2009).

Woran memerintah selama 92 tahun yaitu dari tahun 1348-1440. Menurut Rat Sran Kaimana VIII, pasca meninggalnya raja Woran, ada tiga orang raja lagi yang memerintah, namun tidak ada data yang jelas mengenai kepemimpinan raja-raja selanjutnya ini. Menurut La Aga Samay (Sesepuh kerajaan Sran), pada tahun 1498, pasukan hongii Tidore, menyerang daerah Sran sehingga terjadi perang antara kerajaan Sran melawan pasukan hongii Tidore. Sejak itu Sran harus membawa budak dan burung kuning untuk diantar kepada Tidore. Oleh raja Tidore, mereka ini kemudian di beri hadiah-hadiah serta gelar-gelar seperti Mayor, Sangaji, Jou-Jou dan lain sebagainya.

Sultan Tidore, pernah diketahui mengangkat seorang raja di Pulau Adi, namun keturunan raja tersebut tidak dapat mempertahankan eksistensi kerajaannya. Hal ini tertuang dalam *Memorie-(Vervolg) van Overgave van de (Onder) Afdeeling West Nieuw Guinea, 1932*, dikatakan bahwa Sultan Tidore mengangkat seorang raja di Pulau Adi dan daerah Karufa, seorang Mayor Wanggita, penguasa yang berpengaruh di Teluk Arguni, seorang raja Aiduma untuk daerah dari Aiduma ke Lakahia dan seorang raja Kapia untuk daerah sebelah timur Lakahia. Namun, penerus keturunan raja-raja Adi dan Aiduma tidak dapat mempertahankan eksistensinya sebagai raja (A.L. Vink, "*Memorie-(Vervolg) van Overgave van de (Onder) Afdeeling West Nieuw Guinea, 1932*"). Selanjutnya dalam laporan Etna yang dikutip oleh Pendeta F.C. Kamma (Kepulauan Tidore dan Papua) bahwa tahun 1859 juga ada seorang raja di Adi, yang kerajaannya terbentang dari teluk Kamrao sampai Tanjung Baik serta mencakup Pulau Kara dan Adi. Tidak bisa diselidiki apakah yang dimaksudkan dengan Kara, Karas atau

Karawatu (Memorie van Overgave L.L.A. Maurenbrecher, 1953).

Keterangan tersebut sesuai dengan informasi yang penulis terima dari para keturunan raja Sran dan perangkat adatnya bahwa, pusat kerajaan Sran berada di Pulau Adi, namun pernah terjadi konflik diantara keluarga kerajaan sehingga untuk beberapa waktu lamanya tidak ada raja di kerajaan Sran. sampai kemudian pada tahun 1808, Nduvin diangkat sebagai raja Sran ke IV. Pada waktu itu, pusat Kerajaan Sran masih berkedudukan di Pulau Adi.

### **Masa Pemerintahan Belanda di Nieuw Guinea**

Sebelum pemerintah Belanda berkuasa atas Nieuw Guinea, Raja Nduvin memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya dari Borombow di Pulau Adi ke E'man yang dikemudian hari dikenal sebagai Kaimana. Karena itu Gelar raja Nduvin menjadi Rat Sran E'man IV. Nduvin menikah dengan putri Wai dari Bonggofut. Putri tersebut bermarga Ai dan berasal dari Gunung Natau di Franyau yang bernama Mimbe Werifun.

Menurut keterangan Abdul Hakim Aituarauw (Raja Sran VIII), Nduvin memiliki seorang anak bernama Nawaratu, lebih dikenal sebagai Naro'E. Disamping Naro'E, Raja Nduvin masih memiliki keturunan dari Umburauw kampung Bahumia dan Ubia Sermuku. Dalam masa kekuasaan Nduvin terjadi perubahan politik antara Belanda dan raja-raja di Maluku. Perjanjian-perjanjian yang ditanda tangani oleh Belanda dan raja-raja Maluku pada tahun 1824 itu antara lain berisi bahwa Irian Barat secara resmi diakui sebagai daerah kekuasaan Sultan Tidore (Kamma, 1981). Sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut, pada tahun 1828, Belanda membangun sebuah benteng di teluk Triton di kaki gunung Lemansiri di Lobo (Namatota) Kaimana. Benteng

ini diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1828 dengan nama "Fort Du Bus". Upacara peresmian dihadiri oleh orang Belanda dan juga warga pribumi Papua. Setelah upacara selesai dilakukan penandatanganan surat-surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sendawan (raja Namatota), Kassa (raja Lakahia) dan Lutu (orang kaya Lobo dan Mawara). Ketiga raja ini oleh Belanda masing-masing diberi surat sebagai kepala daerah, berikut tongkat kekuasaan berkepala perak. Selain ketiga kepala daerah ini, diangkat pula 28 kepala daerah bawahan (Koentjaraningrat, 1992). Dengan demikian raja Sran Kaimana menjadi kepala daerah bawahan dari Kerajaan Namatota.

Pengangkatan kepala pemerintahan secara sepihak yang dilakukan oleh Belanda, semakin mengecilkan kedudukan dan kekuasaan raja Sran. Raja Nduvin tidak menentang keputusan itu karena sejak vakumnya Kerajaan Sran, Kerajaan Namatota telah berhasil membangun kekuasaan kerajaannya yang besar. Selama beberapa tahun berikutnya, Raja Nduvin lebih banyak mencurahkan perhatiannya untuk melawan para hong. Tahun 1898, Raja Nduvin wafat. Ia digantikan anaknya Naro'E yang dinobatkan sebagai raja dengan gelar Rat Sran Kaimana V.

Dalam tahun 1898, parlemen Belanda mensyahkan pengeluaran anggaran sebanyak f.115.000 untuk mendirikan pemerintahan di Nieuw Guinea. Pemerintah Belanda membagi daerah Nieuw Guinea ke dalam dua bagian yang masing-masing dikuasai oleh seorang kontrolir. Bagian utara dinamakan Afdeeling Noord Nieuw Guinea dan bagian Barat dan Selatan dinamakan Afdeeling Westen Zuid Nieuw Guinea. Kedua daerah ini merupakan sub bagian dari Keresidenan Maluku. Kontrolir Afdeeling Noord Nieuw Guinea ditempatkan di Manokwari

dan Kotrolir Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea ditempatkan di Fak-fak (Koentjaraningrat, 1992).

Kondisi geografis dan minimnya alat transportasi, menyebabkan banyak daerah di Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea yang penduduknya belum mengetahui kalau pemerintah Belanda sudah menguasai daerah tersebut. Raja Naro'E sebagai raja Kaimana pada saat itu pun ternyata belum mengetahui hal itu, sehingga ia tetap melakukan ekspansi wilayah kerajaannya ke arah barat dan timur melalui perkawinan di kawasan Teluk Berauw. Keluarganya antara lain Fimbay dan Rafideso di Miwara. Di Uduma dengan keluarga Kamakula, di Teluk Bicari dengan keluarga Nanggewa, Nambobo serta keluarga Ai dan di kawasan Mbaham Iha dengan Boki Sekar. Disamping itu ia juga melakukan perang dan pelayaran hongi untuk membebaskan daerah-daerah kekuasaannya yang mulai diekspansi oleh pihak lain. Pasukannya diberi nama Sabakor. Suku ini adalah penguasa-penguasa di lembah utara dataran pegunungan Kumawa. Keluarga ini berdiam di Yarona, Garosa, Hiya, Gaka dan Guriasa.

Raja Naro'E juga membangun hubungan kekeluargaan dengan raja Namatota. Ia menikahkan anak perempuannya Koviai Bata dengan Lakatei yang kemudian menjadi Raja Wertuar. Anak perempuan lainnya yang bernama Sekar Bata dinikahkan dengan Lamora, raja Namatota. Disamping itu cucu perempuannya, dinikahkan dengan seorang Pangeran dari Kerajaan Fer di Langgiar (Nuhu Yuut). Gambaran mengenai pernikahan ini sangat jelas memperlihatkan usaha yang dilakukan secara halus oleh raja Naro'E untuk menanamkan pengaruh kerajaannya, melalui hubungan kekerabatan.

Pada tahun 1912, raja Naro'E berangkat ke Mac Cluer (Teluk Bintuni),

bertemu dengan Kapten Keyts yang memberitahunya bahwa Pemerintah Hindia Belanda sudah secara resmi mendirikan pemerintahannya di Papua. Raja Naro'E menyatakan protes dan nampaknya sangat kecewa dengan tindakan sewenang-wenang Belanda yang mengklaim Papua sebagai miliknya tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya. Akibat kekecewaan ini, ia tidak mau kembali lagi ke kota kerajaannya. Raja Naro'E memilih tinggal di daerah Kokas dan Babo kurang lebih selama 10 tahun (Renaissance Nusantara, 2009). Untuk sementara pemerintahan kerajaan Sran Kaimana dijalankan oleh putranya Achmad Aituarauw.

Tahun 1922, Raja Naro'E kembali ke Kaimana, dan memerintahkan putranya Ahmad Aituarauw untuk menata ibu kota kerajaan, dengan membuka jalan-jalan, menerima pedagang-pedagang, membuka perkebunan kelapa di Kaimana, Sararota, Nusa Venda, Nanasa, Bitsyari dan Lobo. Rakyat pun diperintahkan untuk membuka kebun-kebun kelapa, pala dan lain sebagainya. Pada tahun 1923 Raja Naro'E meninggal dunia dan dikuburkan di samping masjid kerajaannya (masjid Raya) di Kota Kaimana. Beliau digantikan oleh putranya Ahmad Aituarauw yang dinobatkan menjelang penguburan raja Naro'E. Beliau bergelar Rat Sran Eman VI.

Pemerintah Hindia Belanda melalui raja Namatota, memberi tanggung jawab kepada raja Kaimana Ahmad Aituarauw untuk menjaga keamanan di wilayah Kaimana. Untuk melegalitas tugas raja Kaimana tersebut, pemerintah Belanda mengangkatnya dengan gelar "Raja Komisi Kaimana", dalam bahasa setempat disebut "Rat Sran Rat Eman Umisi VI". Ia memerintah dari tahun 1923 hingga tahun 1966 (wawancara La Aga Samay).

Raja Achmad adalah raja yang ahli dalam bidang pertanian dan perdagangan, serta memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahannya dengan baik. Raja Achmad Aituarauw menyatakan kooperatif terhadap Belanda, dengan syarat bahwa Raja tetap mengurus rakyatnya dan budaya serta adat istiadat, pengangkatan kepala kampung oleh raja, pajak *belasting* harus sepengetahuan raja dan tidak akan saling menyerang serta urusan pertahanan terhadap serangan dari luar menjadi tanggungjawab Belanda. Belanda menyetujui syarat tersebut sehingga terjalin kerjasama, dan atas bentuk kerja sama ini maka raja Achmad Aituarauw menerima "*peningen recognitie*" sebesar f.40 per bulan (ANRI: *Memorie van Overgave L.L.A. Maurenbrecher*, 1953). Pada tahun 1930 raja Achmad Aituarauw juga memperoleh penghargaan dari Kerajaan Belanda berupa bintang Oranye Van Nasau (Renaissance Nusantara 2009).

Pada tahun 1953, dalam masa kepemimpinan raja komisi Achmad Mohamad (ketika itu ia telah berusia 60 tahun), desa-desa berikut ini menjadi kekuasaan Rat Sran Raja komisi yaitu: Kilimata, Kembala, Nusawulang, Jarona, Garosa, Guriasa, Gaka, Tairi, Murubia, Kuna, Esania (ANRI: *Memorie van Overgave L.L.A. Maurenbrecher*, 1953: 319) Raja komisi Achmad Mohamad Aituarauw oleh Belanda, kemudian diangkat sebagai kepala Distrik Kaimana.

Pengaturan pembagian wilayah administrasi pemerintah Belanda atas Nieuw Guinea membuat kekuasaan Raja Sran Raja Komisi Kaimana semakin lemah. Secara adat mereka masih tetap menjadi kepala pemerintahan adat, namun secara administratif kedudukan mereka di wilayah pemerintahannya tidak lagi memiliki kekuatan sepenuhnya karena

mereka sudah berada di bawah perintah pemerintah Belanda.

## PENUTUP

Raja-raja Sran, berasal dari pegunungan Mbaham. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1309, atas dukungan penduduk dari Suku-suku Mairasi, Pulau Adi, penduduk Pulau Samai dan Kipia Mimika. Dukungan ini diberikan karena sebenarnya kerajaan ini adalah kerajaan keluarga yang kekerabatannya terjalin akibat perkawinan.

Sebelum masuknya Belanda, kekuasaan raja adalah mutlak. Namun ketika Tidore mulai melebarkan kekuasaannya dan melakukan hongi hingga ke daerah ini, kekuasaan raja semakin menurun karena berada dalam bayang-bayang Tidore. Terlebih setelah terjadi perang saudara diantara keluarga raja. Selama beberapa lama kerajaan ini vakum karena tidak ada raja. Raja yang diangkat oleh Sultan Tidore pun tidak bertahan dan akhirnya vakum juga.

Tahun 1808, kerajaan ini bangkit kembali. Untuk sementara waktu dapat berjalan dengan baik. Namun pada tahun 1898 setelah Nieuw Guinea dinyatakan sebagai milik Belanda, terjadi berbagai perubahan politik yang menyebabkan banyak terjadi perubahan dalam tatanan wilayah kekuasaan raja Kaimana yang berdampak semakin mundurnya kekuasaan raja. Raja berkuasa atas rakyatnya namun bukan raja sendiri yang berkuasa atas rakyat tersebut karena raja maupun rakyatnya berada di bawah kekuasaan Belanda dan harus tunduk pada aturan Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Goodman, Thomas. 2002. *Pemimpin-pemimpin dari Papua dan Seram Timur Sepanjang Awal Periode Modern (17TH - 18TH Berabad-abad)*. Departemen Sejarah University Manoa Hawaii.
- Kamma, Freerk. 1981. *Ajaib di Mata Kita*. Seri Gereja, Agama dan kebudayaan Indonesia, BPK Gunung Mulia, diterjemahkan oleh Koesalah Soebagyo Toer dan dr.Th.van den End.
- Koentjaraningrat. 1992. *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Djambatan
- Mansoben Johzua Robert.1995. *Sistim Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI-RUL.
- Notosusanto, Nugroho. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu, Jakarta.
- Onim, J.F. 2006. *Islam dan Kristen di Tanah Papua*. Bandung: Jurnal Info Media.
- Renaissance Nusantara Edisi Raja Sran Kaimana VIII, 2009, Badan silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara.
- Swartz Marc, Victor W. Turner dan Arthur Tuden. 1966. *Political anthropolog*. Chicago: Aldine.

### ANRI:

- A.L. Vink, "Memorie-(Vervolg) van Overgave van de (Onder)Afdeeling West Nieuw Guinea, 1932", J. Miedema dan W.A.L. Stokhof, *Irian Jaya Source Materials No. 3 Series A-No. 2: Memories van Overgave van de Afdeeling West Nieuw Guinea* (Leiden: DSALCUL/IRIS, 1992),
- L.L.A. Maurenbrecher, "Memorie van Overgave van de Afdeeling West Nieuw Guinea, Fakfak, 1953"